

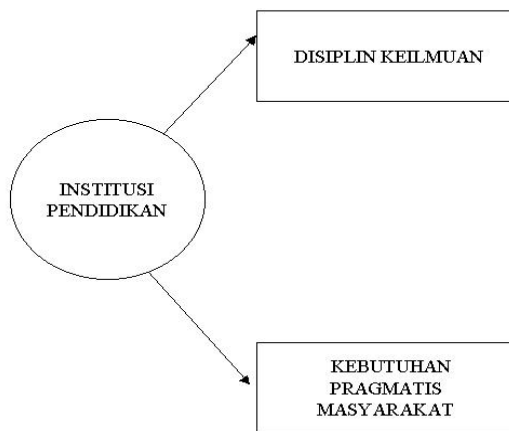
KURIKULUM DAN PENGEMBANGAN STUDI KOMUNIKASI*

Oleh Ashadi Siregar

(1)

Untuk melihat kurikulum dapat dimulai dengan empat tingkat satuan komponen, yaitu institusi pendidikan, set kurikulum, disiplin keilmuan, dan obyek kajian. Seluruh komponen ini merupakan rangkaian yang dimaksudkan mendukung tujuan institusional suatu institusi pendidikan. Tujuan institusional didukung oleh kurikulum yang dijalankan dengan kegiatan akademik. Sementara kurikulum merupakan suatu set pengajaran yang mengandung sejumlah mata pelajaran untuk mendukung tujuan institusional. Adapun keberadaan institusi pendidikan dapat digambarkan sebagai berikut:

Skema I



Secara umum institusi pendidikan dapat dibedakan dari basis keberadaannya, yang terdiri atas 2 cara, yaitu pertama dengan basis disiplin keilmuan, dan kedua atas basis kebutuhan pragmatis masyarakat. Tradisi institusi pendidikan berbasiskan disiplin keilmuan diwujudkan secara formal dalam penyelenggaraan jurusan, atau departemen, atau program studi. Dengan kata lain satuan institusional pendidikan adalah jurusan atau departemen atau program studi yang mendukung disiplin keilmuan tertentu.

Tetapi sering pula dalam mendirikan suatu institusi pendidikan tidak bertolak dari kejelasan disiplin keilmuan, tetapi semata-mata dari kebutuhan pasar. Misalnya, pasar memerlukan penamaan spesifik atas lulusan suatu institusi akademik semacam advertensi, maka nama itulah dipakai sebagai program studi. Dengan cara ini institusi departemen atau jurusan atau program studi, tidak bertolak dari, atau tidak mengampu disiplin keilmuan. Institusi pendidikan ini berbasiskan pada bidang pekerjaan teknis (*vocational*).

Pembahasan ini berusaha untuk menggambarkan posisi institusi pendidikan yang berbasiskan disiplin studi keilmuan, dalam kaitan dengan tujuan institusionalnya sebagai pengampu disiplin Ilmu Komunikasi. Artinya institusi pendidikan ini apakah dengan satuan jurusan atau departemen atau program studi memikul tugas memelihara dan mengembangkan disiplin Ilmu Komunikasi.

* Makalah disampaikan pada *Lokakarya Kurikulum Jurusan Ilmu Komunikasi FISIPOL UMY*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta 23 Juni 1997

Tetapi selain itu perlu pula dilihat pendidikan Ilmu Komunikasi untuk menjawab kebutuhan pragmatis masyarakat. Pelaksanaan pendidikan yang semata-mata hanya untuk kepentingan pengembangan disiplin keilmuan, tentulah tidak mungkin. Karenanya perlu disadari keberadaan disiplin keilmuan itu sendiri, dan posisinya dalam menjawab kebutuhan pragmatis masyarakat tersebut.

Untuk itu uraian akan dimulai dengan mengklarifikasi keberadaan disiplin keilmuan Ilmu Komunikasi, untuk nantinya ditempatkan dalam perspektif tujuan institusional jurusan atau departemen atau program studi penyelenggara pendidikan. Dari sini dapat dijadikan dasar untuk analisis dan proyeksi kurikulum yang dapat fungsional untuk mendukung tujuan institusional pendidikan Ilmu Komunikasi..

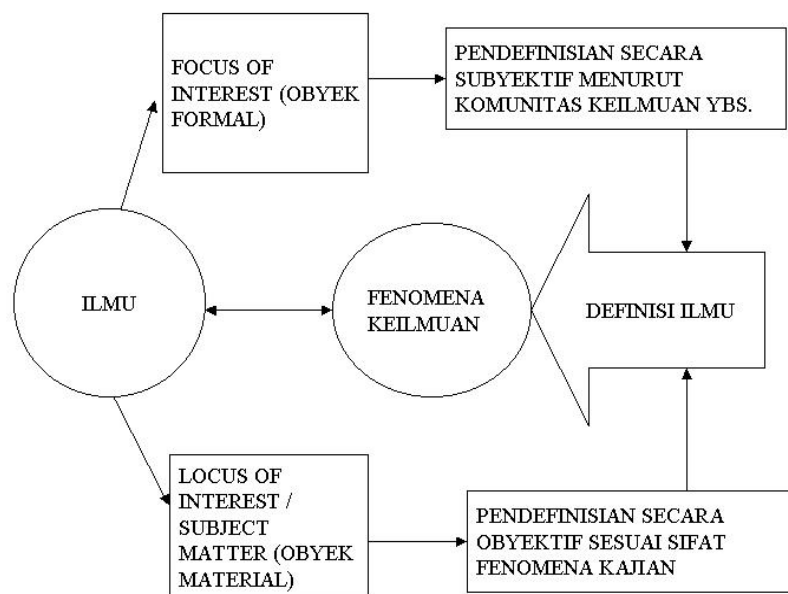
(2)

Disiplin studi atau keilmuan bertolak dari adanya obyek kajian yang khas. Dengan kata lain, obyek kajian ini menandai suatu disiplin keilmuan dapat diper-bedakan dari disiplin keilmuan lainnya. Antara disiplin keilmuan dan obyek kajian tidak dapat dipisahkan. Dari sisi obyek kajian, ada kalanya suatu disiplin mudah dibedakan dari disiplin lainnya. Tetapi sering pula sejumlah disiplin yang berbeda menjadikan obyek yang sama sebagai sasaran, seperti disiplin sosiologi dengan antropologi, lebih-lebih antara sosiologi dengan sosiatri misalnya.

Karenanya keberadaan suatu disiplin dan obyek kajiannya biasa dilihat dari obyek material dan obyek formalnya (The, 1984). Obyek material disiplin sosiologi dan antropologi dapat sama, tetapi obyek formalnya berbeda. Obyek materil bersifat “obyektif”, dapat dirumuskan sebagai karakter obyek itu sendiri. Sedangkan obyek formal merupakan rumusan khas untuk tujuan disiplin keilmuan itu sendiri. Dapat disebut sebagai rumusan “subyektif” dari kalangan disiplin tertentu, untuk menandai keberadaan ilmu tersebut.

Secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut:

Skema II



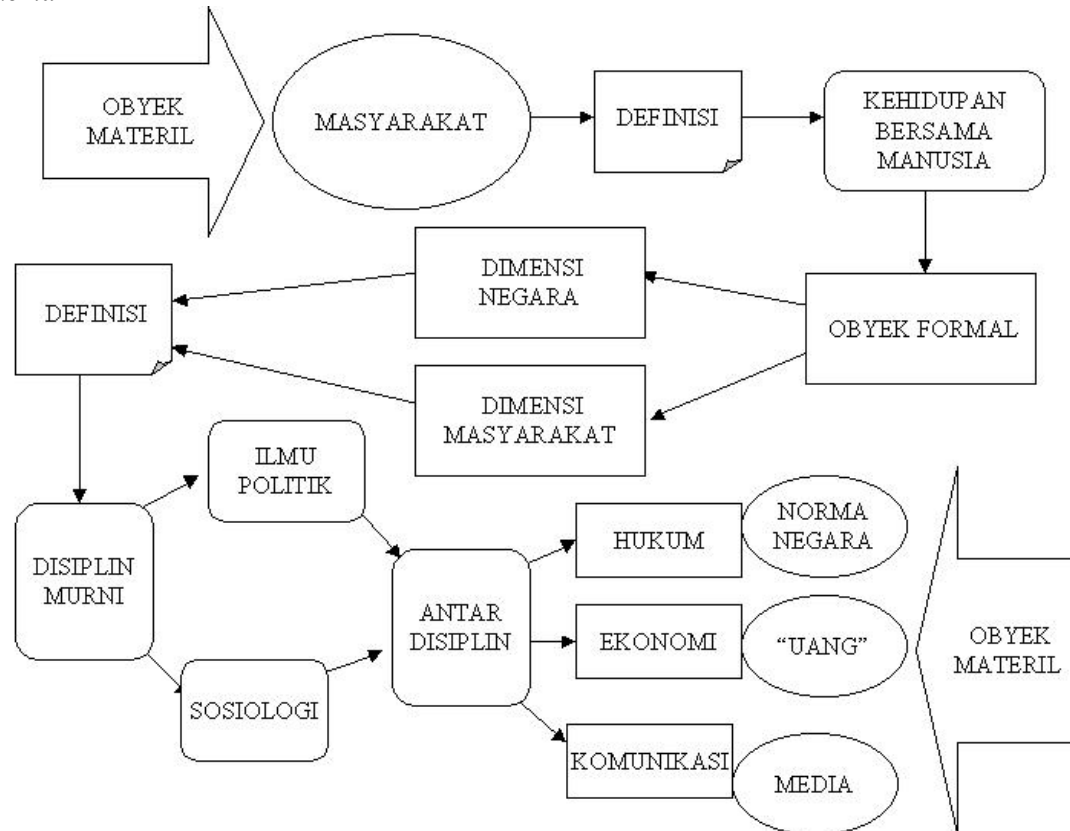
Suatu disiplin keilmuan, biasa dilihat dari rumusan kedua macam obyek tersebut. Kejelasan atas rumusan ini merupakan titik pangkal dari keberadaan disiplin keilmuan. Tetapi rumusan secara sepihak juga belum menjamin keberadaan ini. Dalam prakteknya kehadiran suatu disiplin keilmuan dimulai dari upaya subyektif berupa dukungan kumpulan/kalangan ilmuwan (*scholar*) yang bersang-kutan. Selain itu keberadaannya lebih jauh lagi diakui oleh kalangan lain (dari luar disiplin keilmuan). Selama rumusan obyek formal tidak mendapat pengakuan, kalangan yang lebih “tua” atau lebih “kuat” dari disiplin dengan obyek material yang sama dapat “mengklaim” suatu disiplin yang menyatakan diri sebagai disiplin keilmuan tersendiri, masih sebagai bagian dari disiplin tersebut. Artinya “anggapan” subyektif tidak diakui dalam pergaulan keilmuan.

“Klaim” ini kadangkala membawa konsekuensi dalam keberadaan institusi jika terjadi perombakan administratif, misalnya institusi rumusan formal disiplin keilmuan yang lebih “lemah” posisinya (*rasionale* akademik maupun kecilnya peranan ilmunya), digabungkan ke dalam institusi pengampu disiplin yang lebih tua atau kuat.

(3)

Ilmu Sosial merupakan kumpulan disiplin keilmuan yang menempatkan masyarakat (kehidupan bersama manusia) sebagai obyek materialnya. Dari obyek material inilah dirumuskan berbagai rumusan formal, sehingga melahirkan ilmu politik, sosiologi, ekonomi, dan sebagainya. Dalam garis besarnya, menurut tradisi klasik yang dimulai dari Plato, disiplin yang pertama adalah kehidupan bersama dalam konteks kenegaraan (*polity*). Karenanya dapat disebut Ilmu Politik sebagai disiplin Ilmu Sosial yang tertua. Kemudian disusul dengan disiplin yang menitik-beratkan kepada kehidupan bersama berupa interaksi antar warga. Dengan begitu, ditarik dari sejarah keilmuan, masyarakat sebagai obyek kajian dapat digolongkan dalam 2 dikhotomi, sebagai berikut:

Skema III



Skema di atas menggambarkan sifat intrinsik disiplin keilmuan dilihat dari epistemologi, sesuai dengan perbedaan intrinsik dari masing-masing objek formal dan metodologinya. Dengan demikian posisi suatu institusi pendidikan yang bertugas untuk mengampu suatu disiplin keilmuan dapat diperkembangkan untuk tujuan kehadiran dan pengembangan disiplin keilmuan tersebut.

Pada dasarnya dalam pertumbuhan Ilmu Sosial modern, hampir mustahil untuk bergerak suatu kegiatan keilmuan yang sepenuhnya bersifat murni. Karenanya sebutan *disiplin murni* bagi Ilmu Politik dan Sosiologi hanya untuk menggambarkan dalam konteks genesisnya. Masa sekarang pengkaji Ilmu Sosial akan bertolak dari basis salah satu cabang disiplin untuk efisiensi dalam belajar, sementara dalam praktek keilmuannya, tidak mungkin membatasi sumber belajar hanya dari cabang disiplin basis itu saja.

Selain adanya dua penggolongan besar dalam disiplin atas dasar objek formalnya, dalam disiplin Ilmu Sosial juga bertumbuh disiplin-disiplin keilmuan yang bersifat antar disiplin, yaitu dengan menjadikan masyarakat negara dan masyarakat warga sekaligus sebagai kajian formalnya. Sekaligus pula dalam perkembangannya, juga menumbuhkan objek material “kedua”, yaitu adanya rumusan spesifik yang dijadikan basis dalam objek kajian. Dengan kata lain, disiplin ini bertolak dari objek kajian material yaitu kehidupan bersama manusia yang dispesifikasikan atas dimensi tertentu. Spesifikasi dari objek material ini menjadi lebih kongkrit sifatnya. Karenanya tingkat ini dapat disebut sebagai objek material “kedua”.

Dilihat dari adanya objek material “kedua” yang spesifik ini, disiplin-disiplin ini dapat disebut lebih jelas keberadaannya. Secara sederhana objek kajian tersebut adalah seperti berikut:

Ilmu Hukum: norma yang mengikat, undang-undang, peraturan, dan sejenisnya.

Ilmu Komunikasi: media, atau situasi/fasilitas komunikasi (yang memungkinkan manusia menyampaikan dan menerima informasi).

Ilmu Ekonomi: uang, atau situasi/fasilitas yang memungkinkan manusia mengelola uang/kekayaan materil.

Antropologi: simbol, atau bentuk-bentuk yang bermakna dalam kehidupan manusia.

Dari pemaparan ini sebenarnya tidak ada alasan untuk mengeluh, seolah-olah belajar Ilmu Komunikasi itu terlalu abstrak. Setelah menyadari obyek material, obyek formal, kemudian adanya obyek material “kedua”, maka Ilmu Komunikasi sebagaimana disiplin Ilmu Hukum, Ekonomi dan Antropologi memiliki obyek kajian yang kongkrit.

Seluruh Ilmu Sosial pada dasarnya menggunakan metodologi yang sama. Metodologi adalah cara mendekati dan merumuskan informasi dari obyek kajian (Babbie, 1983; Bowers dan Courtright, 1984). Perbedaan disiplin keilmuan dalam Ilmu Sosial; adalah dilihat melalui epistemologi dari genesis obyek kajiannya. Dari perbedaan obyek kajian formal ini dilahirkan konsep teoritis yang khas.

Dengan kata lain, selain adanya kejelasan obyek kajian, adanya teori juga menandai suatu disiplin dapat digolongkan sebagai suatu Ilmu. Selain itu dalam kegiatan keilmuan sering pula disinggung adanya paradigma dan perspektif. Ini merupakan gejala dalam Ilmu Sosial modern, sebab selain munculnya penajaman spesialisasi disiplin keilmuan, berkembang pula sejumlah konsep teoritis yang bersifat holistik, mencakup seluruh obyek material. Teori bersifat holistik ini biasa disebut paradigma. Paradigma merupakan konsep yang dapat digunakan untuk mendekati suatu obyek kajian material dan formal sekaligus yang tidak terikat kepada konsep teoritis dari disiplin keilmuan tersebut. Secara sederhana dapat disebut bahwa paradigma dapat digunakan untuk melihat sifat, dinamika, atau trend masyarakat, melewati batas-batas obyek formal (negara dan warga). Dengan cara lain, teori semacam ini ada yang menyebut sebagai *grand-theory*. Dalam analisis Ilmu Komunikasi paradigma ini misalnya teori struktural konflik sosial, struktural fungsional, atau hegemonik, dan sebagainya.

Selain itu ada pula analisis yang tidak bertumpu semata-mata kepada disiplin dengan obyek kajian formal tertentu. Analisis semacam ini akan menggunakan perspektif. Perspektif merupakan cara pandang yang bersifat lintas disiplin. Dengan kata lain, perspektif adalah teori yang digunakan untuk kepentingan analisis dalam suatu disiplin keilmuan, yang berasal dari disiplin keilmuan dengan obyek formal yang berbeda. Dalam disiplin Ilmu Komunikasi misalnya penggunaan teori sosiologi dalam analisis media, dikenal sebagai kajian media dengan perspektif sosiologis.

(4)

Pembicaraan di atas mencoba memaparkan landasan bagi suatu institusi pendidikan yang berbasiskan kepada disiplin keilmuan yang didekati secara epistemologis. Tetapi sebagaimana sebelumnya disinggung selintas, suatu institusi pendidikan dapat juga diadakan tidak bertolak dari landasan epistemologi, tetapi kebutuhan pragmatis dalam masyarakat. Kebutuhan pragmatis ini dapat disebut dorongan pasar, dapat berkonteks politis (pembangunanisme), industrial (kapitalisme), atau lainnya pemakai output institusi pendidikan dalam masyarakat. Prinsip *link and match* dapat diartikan secara positif dalam pengertian ini, yaitu menjadikan peserta dalam institusi pendidikan dapat sesuai dan terpakai secara tepat dalam masyarakat.

Pandangan bahwa setiap institusi pendidikan diadakan bertolak dari disiplin keilmuan, sementara disiplin keilmuan lahir dari obyek kajian yang khas, sepenuhnya bergerak dalam alur pembentukan (genesis) dari disiplin keilmuan. Dimulai dari Plato pada masa Yunani kuno yang memulai kajian masyarakat negara (*polity*), kemudian Auguste Comte pada abad 19 di Perancis yang memberikan penajaman atas disiplin analisis masyarakat warga, institusi pendidikan “Ilmu Sosial” pada tahap awalnya bertujuan untuk memberi pencerahan kepada peserta didiknya dalam memahami realitas negara atau kehidupan warga. Setelah mengalami pencerahan, lantas apa?

Pertanyaan ini harus dijawab bahwa peserta didik akan disiapkan untuk hadir di masyarakat. Karenanya tradisi pendidikan demi keilmuan yang bersifat ekstrim semacam di zaman Yunani kuno atau abad ke-19 sudah tidak diketemukan lagi dalam penyelenggaraan pendidikan. Kendati berbasiskan disiplin keilmuan, tetap diharapkan output institusi pendidikan dapat fungsional dalam masyarakat.

Dalam kaitan ini dapat dievaluasi penyelenggaraan pendidikan Ilmu Komunikasi dengan mempertanyakan keberadaan Ilmu Komunikasi dalam kancah pengembangan disiplin keilmuan, keberadaan di tengah masyarakat, dan keberadaan institusi penyelenggara dalam mencapai tujuan institusionalnya melalui kurikulumnya. Pengembangan Ilmu Komunikasi dapat dilihat setidaknya melalui karakteristik teori-teori yang digunakan selama ini, yang mencakup teori normatif, teori empiris dan teori aplikatif/praktis. Ketiga macam teori ini digunakan sesuai dengan tujuan yang berbeda (McQuail, 1987).

Teori normatif umumnya diambil dari Filsafat Sosial digunakan untuk menganalisis fenomena komunikasi yang bersifat makro maupun nilai etis yang mendasari perilaku komunikasi. Teori empiris digunakan dalam menganalisis fenomena komunikasi yang bersifat mikro dan empiris. Teori aplikatif digunakan dalam kerja teknis yang berkaitan dengan bidang komunikasi. Pemilahan ketiga macam domain teori ini akan membantu kita untuk melihat masalah yang selama ini dihadapkan dengan lembaga pendidikan komunikasi.

Jika lulusan sekolah komunikasi dianggap tidak peka dalam memahami masalah-masalah makro yang berkaitan dengan interaksi institusional institusi komunikasi dengan institusi sosial lainnya dalam sistem sosial, kiranya domain teori normatif yang relevan kurang dikembangkan dalam proses belajar-mengajar. Tuduhan bahwa analisis lulusan sekolah komunikasi tidak tajam dan tidak berdaya guna dalam menghadapi masalah-masalah komunikasi yang bersifat mikro, dapat disebut kelemahan yang berasal dari kurangnya pengembangan teori empiris. Sedang cercaan dari dunia kerja yang menganggap lulusan kita tidak kapabel secara teknis, tentulah ini diakibatkan kelemahan pengembangan teori aplikatif dalam penyelenggaraan pendidikan komunikasi.

Idealnya, set kurikulum dapat menyajikan ketiga domain teori tersebut, sehingga lulusan kita memiliki wawasan makro untuk berpikir global, ketajaman analisis mikro, dan bisa kapabel secara teknis untuk dunia kerja dalam berbagai institusi komunikasi. Dengan kata lain, proses belajar-mengajar diharapkan dapat menyiapkan lulusan yang memiliki kapasitas sebagai ilmuwan sekaligus praktisi. Tetapi harapan yang idealistis sering mengabaikan kecenderungan individual mahasiswa, ditambah lagi dengan tujuan institusional yang dilekatkan secara formal atas lembaga pendidikan komunikasi.

Tujuan institusional dicapai melalui kurikulum dan proses belajar-mengajar. Pendidikan Ilmu Komunikasi diselenggarakan oleh Jurusan Ilmu Komunikasi, sebagai bagian integral dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Penamaan formal lulusan

jurusan ini adalah sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan spesialisasi Ilmu Komunikasi. Belakangan julukan (gelaran)nya disebut Sarjana Ilmu Politik (SIP). Dengan begitu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dipandang memproses 2 macam sarjana, yaitu Sarjana Ilmu Sosial (SSos) dan SIP. Bagaimana kisahnya sehingga lulusan dari institusi pendidikan Ilmu Komunikasi diberi label Sarjana Ilmu Politik, belum pernah ada penjelasan secara epistemologis.

Dari sini, pengembangan kesadaran untuk menempatkan Ilmu Komunikasi sebagai sub-disiplin Ilmu Sosial harus dilakukan, dengan menjadikan sejumlah mata pelajaran yang bersifat umum fakultas sebagai mata pelajaran wajib ditempuh oleh mahasiswa. Selain itu mahasiswa juga diberikan peluang untuk mengenali sub-disiplin ilmu lain yang berada di lingkungan fakultas, melalui mata pelajaran pilihan.

Secara teknis kurikulum pada institusi pendidikan Ilmu Komunikasi tersusun dalam 3 tingkat, yang terdiri atas mata pelajaran universitas, fakultas, dan jurusan (lihat: *Buku Panduan Akademik FISIPOL UGM*, 1991). Mata kuliah Universitas umumnya berasal dari disiplin humanities dan yang bersifat politis, misalnya Agama, Kewiraan, Budaya Dasar, Pancasila dan KKN. Sedang mata kuliah fakultas berupa pengantar ilmu-ilmu Sosial dan Politik atau teori sosial, yaitu pengantar Sosiologi, Ilmu Politik, Ilmu Ekonomi, Ilmu Hukum, Antropologi Budaya, Sistem Sosial, Metode Penelitian Sosial, dan Sejarah. Ditambah dengan mata pelajaran pilihan umum yang diambil dari jurusan-jurusan lain dari Fakultas.

Kurikulum berusaha untuk menampung permasalahan yang dihadapi oleh dunia pendidikan. Proses-mengajar tidak hanya berkaitan dengan kurikulum, tetapi juga dengan faktor pengajar. Karenanya mata pelajaran yang disediakan dalam kurikulum hanyalah yang diproyeksikan dapat dijalankan karena adanya pengajar yang bersedia dan sanggup mengasuh mata pelajaran dimaksud. Dengan bertolak dari Satuan Acara Pengajaran yang disusun setiap pengasuh mata pelajaran, pengajaran yang bersifat mikro dapat dinilai kesesuaiannya dengan tujuan kurikuler.

Jika dengan mata pelajaran Fakultas mahasiswa diproses untuk memiliki perspektif keilmuan Sosial dan Politik, maka dengan mata pelajaran Jurusan, mahasiswa belajar untuk memiliki kapabilitas sebagai penganalisis fenomena media. Kesarjanaan Ilmu Komunikasi pada hakekatnya dicapai melalui proses belajar-mengajar dengan mata pelajaran Jurusan. Kesarjanaan yang berorientasi keilmuan ini dengan sendirinya menuntut lulusan Jurusan untuk membuktikan kemampuan metodologi dan penguasaan teoritik normatif dan empiris Ilmu Komunikasi, pembuktian ini dilakukan melalui penelitian untuk dan penulisan skripsi. Karenanya bimbingan selama penelitian dan penulisan skripsi ini dipandang sebagai proses belajar-mengajar yang mengutuhkannya seluruh penguasaan metodologis dan pemahaman teoritis atas media.

Meskipun tujuan institusional Jurusan Ilmu Komunikasi dikesankan kepada orientasi keilmuan yang bersifat analitis, realitas dunia praktis yang bersifat teknis tentunya tidak terelakkan. Untuk itu sejumlah MP perlu disiapkan dengan memuat sekaligus dalam proses belajar-mengajarnya untuk mengenali fenomena dunia kerja komunikasi, serta aspek-aspek teknis di dalamnya.

Masalah pemilahan domain teori serta peninjauan orientasinya agaknya perlu dilihat lebih tajam. Dari sini kita dapat melangkah lebih jauh dalam proses belajar-mengajar. Setiap mahasiswa pada dasarnya adalah individu yang memiliki kecenderungan yang spesifik, karenanya lembaga pendidikan perlu menawarkan kemungkinan yang lebih bervariasi, untuk mengembangkan kapasitasnya secara maksimal. Mungkin masalahnya

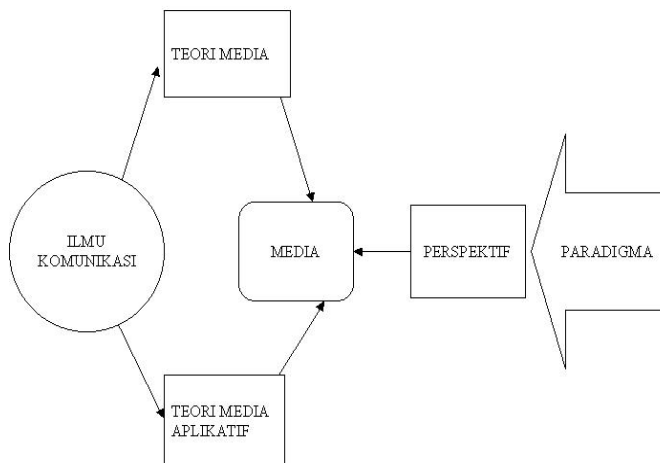
bukan pilihan antara menjadi Ilmuwan atau praktisi. Tetapi tersedia lebih banyak peluang. Sebagai Ilmuwan, ilmuwan dalam kapasitas macam apa, dan sebagai praktisi untuk kerja teknis macam apa?

Kapasitas sebagai Ilmuwan tentunya merupakan prasyarat yang tidak terelakkan, dengan drajat penguasaan metodologi domain teori tertentu, yang perlu kita proyeksikan. Atau kapasitas untuk menjadi praktisi, perlu dirumuskan lebih spesifik, sebab dunia kerja sedemikian bervariasi. Dunia media-massa saja misalnya, terdiri dari berbagai lapangan kerja yang berbeda-beda.

(5)

Keberadaan Ilmu Komunikasi sebagai satu disiplin studi dengan obyek kajian yang khas dan domain teorinya, sudah tidak diperdebatkan lagi (lihat: Davison dan Yu, 1974; Severin dan Tankard, 1979; Rogers dan Chaffe, 1983; Littlejohn, 1996). Lebih jauh pendidikan Ilmu Komunikasi dapat dijabarkan dengan lebih spesifik sebagai studi media (*media studies*). Definisi keilmuan yang bertolak dari kajian fenomena komunikasi, dapat dikongkritkan atas media. Dengan kata lain, media ditempatkan sebagai *point of view*, sehingga seluruh teori dapat dilihat dalam kaitan dengan media. Kalau disederhanakan, Ilmu Komunikasi dapat digambarkan sebagai berikut:

Skema IV



Ilmu Komunikasi menempatkan media sebagai obyek kajian. Dalam garis besar secara fisik media dapat digolongkan atas 3 kelompok, yaitu media sosial, media massa, dan media interaktif (lihat: Rogers, 1983; Rogers 1986). Dalam menghadapi obyek kajian ini Ilmu Komunikasi memiliki 2 macam teori, pertama teori media empiris (seterusnya disebut teori media) yang bersifat intrinsik dan ekstrinsik untuk menjelaskan karakter media; dan kedua teori media bersifat aplikatif yaitu berkaitan dengan aspek-aspek pragmatis dalam penggunaan media.

Teori media menjelaskan karakter media sosial semacam media interpersonal dan media kelompok; atau media pers, radio, televisi, film, dan rekaman; atau media internet dan telekomunikasi. Teori ini membantu untuk mengenali karakter media sebagai fenomena sosial. Muatan teori media empiris bersifat intrinsik antara lain menjelaskan anatomi, mekanisme dan sebagainya. Sedang teori media bersifat ekstrinsik menjelaskan keberadaan media dalam konteks masyarakat, semacam teori fungsi dan efek media,

gratifikasi dan sebagainya. Banyak di antara teori media yang bersifat ekstrinsik ini dikembangkan oleh sarjana yang berasal dari disiplin lain di antaranya ilmu politik, sosiologi dan psikologi sosial.

Sedangkan teori media bersifat aplikatif berkembang dalam penggunaan media, semacam propaganda, jurnalisme, sinematografi, desain publikasi, dan sebagainya. Teori aplikatif pada dasarnya bersifat teknis untuk menggerakkan mekanisme kerja suatu media, sepenuhnya berkonteks ke dalam media. .

Secara sederhana teori media dan teori media aplikatif dapat dibedakan dari sisi konteks dan sifatnya dalam menjelaskan media. Dalam bagan sederhana sebagai berikut:

TEORI MEDIA	TEORI MEDIA APLIKATIF
Media berkonteks ke luar	Media berkonteks ke dalam
Keberadaan media dalam masyarakat	Aspek teknis menggunakan media

Masing-masing teori memiliki fungsi yang khas. Teori media empiris pada dasarnya menempatkan media sebagai fenomena sosial, karenanya keberadaannya dilihat dalam konteks dengan masyarakat. Dengan demikian teori ini menjadi dasar dalam analisis sosial atas keberadaan media di tengah masyarakat. Sedangkan teori media aplikatif bersifat memberi gambaran ke dalam media, menyangkut aspek-aspek teknis dalam operasi media. Teori ini dapat dijadikan dasar dalam analisis atas bekerjanya media, karenanya jika dijadikan dasar bagi latihan psikomotorik, untuk menjalankan atau mengoperasikan media.

Selain teori media, dalam analisis media banyak pula digunakan perspektif. Perspektif dalam Ilmu Komunikasi berasal dari teori-teori yang lahir dari disiplin Ilmu Sosial lainnya, baik yang menjadikan obyek formalnya negara maupun warga. Perspektif yang banyak digunakan adalah dari teori politik dan sosiologi, karenanya melahirkan sub-domain yang komunikasi politik dan sosiologi komunikasi. Sedangkan paradigma yang digunakan sama halnya dengan disiplin Ilmu Sosial lainnya. Dengan begitu melalui perspektif Ilmu Komunikasi bersifat antar disiplin, dan dengan paradigma Ilmu Komunikasi berada pada dataran yang sama dengan disiplin Ilmu Politik dan Sosiologi.

Jika dikaitkan dengan obyek material Ilmu Sosial, maka konteks dari media adalah kehidupan bersama manusia, dan dalam kaitan dengan obyek formal, mencakup kedua dimensi, yaitu masyarakat negara (*polity*) dan masyarakat warga. (lihat: *Skema III*). Dengan kata lain, konteks keberadaan media adalah negara dan warga. Bahkan untuk perspektif teoritis dalam analisis Ilmu Komunikasi terutama yang berkaitan dengan khalayak media, lebih banyak menggunakan teori yang berasal dari sosiologi dan psikologi sosial. Karenanya sebutan bagi keluaran institusi pendidikan Ilmu Komunikasi sebagai Sarjana Ilmu Politik sebenarnya telah mereduksi cakupan obyek formal ini.

Terlepas dari penamaan kesarjanaan bagi keluaran institusi pendidikan Ilmu Komunikasi, keberadaan institusi ini perlu dilihat dari konteksnya dalam masyarakat. Pengguna dari keluaran ini pada dasarnya adalah masyarakat, baik pada institusi negara maupun institusi warga. Jika dibandingkan, tentunya lebih banyak yang masuk ke dalam institusi warga ketimbang institusi negara (birokrasi negara). Institusi-institusi dalam masyarakat yang membutuhkan atau menyerap lulusan pendidikan Ilmu Komunikasi jika harus didentifikasi, jumlahnya sangat banyak, yaitu setiap organisasi dalam institusi masyarakat yang memerlukan dukungan kegiatan bermedia. Bahkan lulusan pendidikan dengan obyek formal negara semacam Ilmu Politik (ilmu pemerintahan dan ilmu hubungan antar negara), belakangan ini lebih banyak diserap oleh institusi masyarakat (swasta).

Karenanya konsep *link and match* yang didengungkan itu perlu secara spesifik dilihat dalam hubungan antara institusi pendidikan tinggi dengan institusi masyarakat.

(6)

Jika disepakati bahwa penyelenggaraan pendidikan kesarjanaan (S1) Ilmu Komunikasi berbasiskan disiplin Ilmu Komunikasi, maka tujuan kurikuler yang utama adalah memberi pelatihan disiplin keilmuan ini dalam menghadapi obyek kajian, baik obyek material, obyek formal maupun obyek material (“kedua”). Dalam penyelenggaraan ini dapat dipertanyakan pola yang dijalankan, yaitu apakah latihan akademik ini bermula dari obyek formal dengan perspektif Ilmu Sosial (dimensi negara dan warga), baru kemudian memasuki obyek material; ataukah menetapkan obyek material (“kedua”) sebagai *point of view* baru kemudian dilihat konteksnya dalam perspektif obyek formal.

Dilihat dari susunan kurikulum jurusan Ilmu Komunikasi yang ditetapkan oleh pemerintah, maka latihan akademik yang dijalankan adalah terlebih dulu dengan perspektif sosial dan politik, baru disusul kemudian dengan kajian media. Artinya pilihan pada pola pertama. Kajian atas obyek material berupa media dilakukan setelah peserta didik belajar perspektif teoritis untuk mengenali masyarakat melalui dimensi negara dan warga.

Tentunya ada *rationale* di balik pilihan pola kurikulum tersebut, yang tidak perlu dibahas disini. Untuk kepentingan yang lebih langsung adalah mencari arah kurikulum yang lebih efisien dalam melakukan kajian media yang menjadi obyek material kedua bagi Ilmu Komunikasi. Dengan kata lain, dari mana dan sisi mana pun yang menjadi *point of view*-nya, kurikuler diharapkan dapat memberikan latihan akademik agar peserta didik dapat mengenali dan memahami media dalam masyarakat. Lebih jauh, pilihannya apakah pemahaman itu hanya untuk dapat melakukan analisis tentang keberadaan media dalam masyarakat, ataukah dapat melakukan secara teknis pekerjaan dalam media. Kedua macam latihan ini memerlukan basis kurikuler yang khas. Secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut:

TUJUAN KURIKULER	KEBUTUHAN
Mengenali MEDIA dalam masyarakat	Teori Media
	Perspektif
	Paradigma
	Latihan metodologi
Melakukan pekerjaan teknis dalam MEDIA	Teori Aplikatif
	Latihan psikomotoris

Kolom pertama dititik-beratkan kepada kemampuan metodologis agar peserta didik dapat menganalisis keberadaan media intrinsik maupun ekstrinsik. Dengan penguasaan teori dan kemampuan metodologis, pada satu tahap keluaran institusi adalah seorang ilmuwan dengan spesialisasi media. Pada tahap berikutnya, dia diharapkan dapat lebih mudah dan lebih cepat menyesuaikan diri dengan pola-pola kerja teknis media jika ia bermaksud bekerja di dalamnya.

Keluhan bahwa keluaran institusi pendidikan Ilmu Komunikasi tidak dapat bekerja secara teknis di media, dapat dilihat dari sini. Permasalahannya, apakah peserta didik memang sudah belajar secara tepat untuk mengenali media? Dengan kumpulan mata pelajaran yang tetap tercerai-berai bagi peserta didik, boleh jadi sampai akhir studinya tidak ada media yang benar-benar dikenalnya. Mungkin memang kelemahan ini bersumber pada muatan kurikulum, mungkin juga dalam proses belajar-mengajar yang

dijalankan pengajar studi media, atau mungkin dari sikap peserta didik yang tidak sepenuhnya berniat untuk mengenali media.

Dorongan yang kuat untuk menyelenggarakan studi media ini perlu dipunyai oleh pengajar maupun peserta didik. Dengan media sebagai *point of view*, dapat dikembangkan orientasi akademik yang lebih jelas arahnya. Semua mata pelajaran pada dasarnya adalah berupa konsep teoritis, baik teori empiris atau pun aplikatif. Pengajaran pada dasarnya mentransfer konsep teoritis ini, sehingga peserta didik dapat mengenali karakter media (teori empiris) atau pola teknis dalam media (teori aplikatif). Teori dapat diajarkan pada tingkat kognitif. Jika dimaksudkan pada tingkat afektif atau psikomotoris, perlu ada latihan metodologis. Latihan metodo-logis untuk teori empiris dilakukan melalui penelitian, sedang latihan metodologis untuk teori aplikatif dilakukan dengan simulasi teknis.

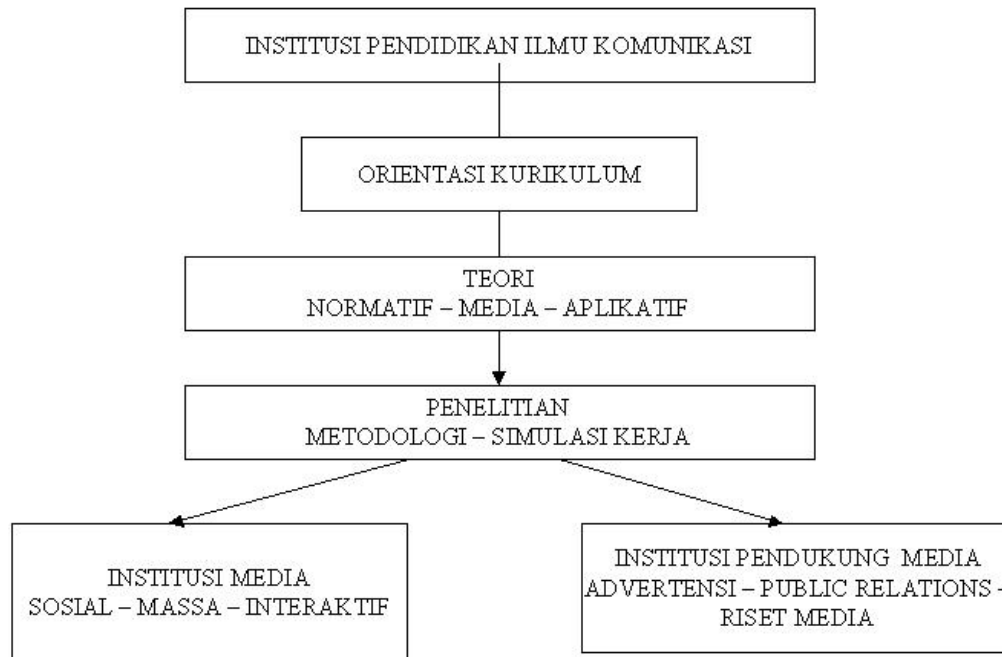
Latihan akademik yang merangkumkan seluruh konsep teoritis (normatif, empiris maupun aplikatif) dilakukan pada saat melakukan penelitian untuk tugas akhir. Disini dapat dilihat sejauh mana sebenarnya peserta didik menaruh perhatian terhadap teori dan obyek kajian studinya, sekaligus prediksi bagi masa depannya. Jika seseorang melakukan penelitian tentunya karena dia ingin lebih mengenali obyek kajian yang dipilihnya. Lebih jauh pilihan ini tentunya karena dia ingin pengetahuan tentang obyek ini dapat digunakannya ketika akan memasuki masyarakat.

Tetapi sayangnya jarang peserta didik yang mau memanfaatkan latihan akademik ini untuk persiapan memasuki institusi masyarakat. Kebanyakan melihat latihan metodologis ini hanya persyaratan formal, karenanya hanya berusaha memilih obyek kajian dan mencari dosen pembimbing yang diperkirakan mudah untuk “dilewati”. Akibatnya sampai akhir pendidikannya, peserta didik ini tidak pernah belajar secara mendalam tentang obyek kajiannya. Saat berada di masyarakat setelah lulus pendidikan, dia masih akan belajar dari awal. Jika dia berada di institusi Non-Media, tentunya tidak menjadi soal. Tetapi jika di lingkungan institusi media dia harus belajar sama halnya dengan keluaran institusi pendidikan Non-Komunikasi, tentunya kenyataan ini memprihatinkan. Karena terjadi pemborosan waktu.

(7)

Prinsip *link and match* dalam penyelenggaraan institusi pendidikan Ilmu Komunikasi dapat dijalankan dengan kejelasan orientasi. Dengan kata lain, orientasi pendidikan yang diwujudkan melalui kurikulum dan proses belajar-mengajar perlu dilihat dari kaitannya dengan masyarakat yang diproyeksikan akan menerima keluaran institusi. *Link and match* ini pada dasarnya ada orientasi dari institusi pendidikan dengan institusi masyarakat yang akan menerima “jasanya”, baik berupa pelayanan berupa riset dan konsultasi, maupun peserta didik keluarannya yang sesuai untuk masuk ke dalam institusi masyarakat tersebut. Dengan begitu institusi masyarakat sebagai penerima “jasa” institusi pendidikan itu dapat dipandang sebagai “*client*”. Secara sederhana dapat dibagikan sebagai berikut:

SKEMA V



Dari sini dapat diidentifikasi adanya dua macam institusi masyarakat yang menjadi “client” bagi institusi pendidikan Ilmu Komunikasi, yaitu institusi media dan institusi atau sistem pendukung media (*media support systems*). Setiap institusi memiliki karakter yang khas. Institusi media dalam garis besarnya terbagi 3 (sosial, massa dan interaktif), dan masing-masing institusi masih terbagi lagi dalam sejumlah tipe media. Untuk mengenali berbagai tipe media ini dilakukan dengan konsep teoritis baik empiris maupun aplikatif, dan secara langsung (kenyataan empiris) dilakukan melalui metodologi.

Kurikulum yang menampung orientasi terhadap institusi media dan pendukung ini memerlukan penjabaran yang spesifik sesuai dengan tujuan proses belajar-mengajar. Sebagai ilustrasi, institusi media massa terdiri atas media pers, radio, televisi, film, rekaman, dapat diajarkan dengan konsep teori empiris dan aplikatif yang dapat menjelaskan karakter sosial maupun teknis masing-masing media. Begitu pula dengan sistem pendukung media, memerlukan kejelasan dalam pengembangan teori empiris dan aplikatifnya.

Tujuan kurikulum dapat pula diproyeksikan atas dasar perbedaan keluaran suatu institusi pendidikan dengan keluaran institusi lainnya. Katakanlah misalnya, bagaimana membedakan keluaran jurusan Ilmu Komunikasi dengan jurusan Ilmu Pemerintahan atau Sosiologi? Dari sisi dunia kerja, perbedaan pada dasarnya tidak terlalu signifikan. Berbagai bidang pekerjaan teknis (*vocational*) saat ini kebanyakan bersifat terbuka. Artinya persyaratan yang ditetapkan dalam rekrutmen adalah untuk lulusan S1, tanpa mempersoalkan spesialisasi disiplin studi. Bahkan bukan hanya terbuka bagi lulusan Ilmu Sosial, keluaran institusi pendidikan studi humanities juga memiliki peluang yang sama.

Dengan bertolak dari domain teori yang diajarkan dan obyek kajian yang dipelajari, sebenarnya spesifikasi keluaran institusi pendidikan Ilmu Komunikasi dapat dibedakan

secara jelas dengan keluaran institusi lain. Secara sederhana dapat disebut bahwa keluaran institusi pendidikan Ilmu Komunikasi lebih mengenali media jika dibandingkan dengan keluaran institusi lain. Karenanya dengan pengenalan yang lebih ini, seharusnya jika harus bersaing dengan keluaran jurusan lain di lingkungan media, sarjana Ilmu Komunikasi akan lebih mudah menyesuaikan diri dalam pengembangan kemampuan teknis.

Dari sini dapat dirumuskan sasaran pendidikan Ilmu Komunikasi adalah menjadikan peserta didik mengenali keberadaan media di tengah masyarakat. Artinya seorang sarjana Ilmu Komunikasi adalah seorang yang menguasai domain teoritis tertentu yang dapat digunakannya untuk mengenali karakter media. Tetapi sasaran semacam ini dianggap tidak memadai. Permasalahan yang sering dikeluhkan adalah kurangnya simulasi teknis untuk menjalankan teori media aplikatif. Untuk itu perlu diidentifikasi lebih jelas teori aplikatif yang paling sesuai untuk disimulasikan. Sebab sebelum memasuki teori aplikatif, harus dipahami teori media empiris yang menjadi landasan bagi teori aplikatif tersebut. Dengan kata lain, setiap teori media aplikatif adalah berasal dari pola teknis dalam institusi media atau sistem pendukung media tertentu. Dengan begitu kenali lebih dulu karakter media, baru kemudian masuki pola teknis di dalamnya.

Simulasi teknis suatu teori aplikatif dengan sendirinya memerlukan fasilitas pendukung. Teori media aplikatif ini dapat dikembangkan sesuai dengan tuntutan (*expectation*) institusi “client”. Pilihan prioritas dari penyelenggaraan konsentrasi media dan teori aplikatifnya, selain didorong oleh tuntutan atau harapan institusi “client” tentunya juga bertolak dari kemampuan dan ketersediaan sumber daya, baik manusia maupun *technicalities* di lingkungan jurusan, fakultas dan universitas.

R U J U K A N

Babbie, Earl, (1983) *The Practical of Social Research*, third edition, Wadsworth Publishing Company, Belmont

Bowers, John Waite dan Courtright, John A., (1984) *Communication Research Methods*, Scott, Foresman and Company, Glenview, Illinois

Davison, W. Philips dan Yu, Frederick T.C. (1974) “An Attempt to Structure the Field”, dalam Davison dan Yu (ed.) *Mass Communication Research*, Major Issue and Future Directions, Praeger Publishers, New York

Littlejohn, Stephen W., (1996) *Theories of Human Communication*, fifth edition, Wadsworth Publishing Company, Belmont

McQuail, Denis, (1987) *Teori Komunikasi Massa, Suatu Pengantar*, edisi kedua, terjemahan Dharma dan Ram, (1989), Penerbit Erlangga, Jakarta

Rogers, Everett M., (1994) *A History of Communication Study, a Biographical Approach*, The Free Press, New York

-----, (1986) *Communication Technology, the New Media in Society*, The Free Press, New York

- , (1983) *Diffusion of Innovation*, third edition, The Free Press, New York
- , dan Chaffe, Steven H., (1983) "Communication as an Academic Discipline: A Dialogue", dalam Gerbner (ed.) *Ferment in The Field*, Journal of Communication Summer 1983, Vol. 33 Number 3, University of Pennsylvania, Philadelphia
- Severin, Werner J., dan Tankard James W., (1979) *Communication Theories, Origins Methods Uses*, Hasting House Publishers, New York
- The Liang Gie, (1984) *Konsepsi Tentang Ilmu*, Yayasan Studi Ilmu dan Teknologi, Yogyakarta
- (nn), (1991) *Buku Panduan Akademik FISIPOL Universitas Gadjah Mada*, (np), Yogyakarta